

BAB I

PENDAHULUAN

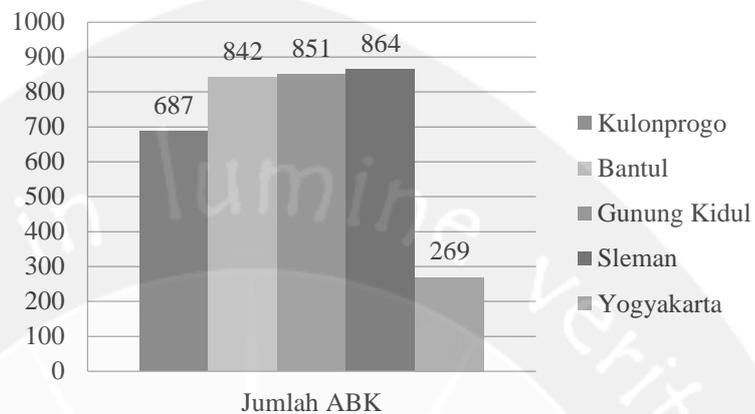
I.1 Latar Belakang

I.1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek

Pendidikan adalah hak bagi setiap anak, termasuk anak dengan disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pendidikan bagi ABK di Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 terdiri dari pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif. Pendidikan luar biasa merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan khusus bagi ABK. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran bersama peserta didik umum (Kementerian Pendidikan Nasional RI, 2009). Pendidikan inklusif melalui sekolah inklusi diselenggarakan bagi ABK dengan standar potensi kecerdasan, sedangkan pendidikan luar biasa melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) menyelenggarakan pendidikan khusus bagi semua ABK tanpa terkecuali.

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan bagi ABK di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu bagian dari Visi dan Misi Gubernur DIY yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2012-2017. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan bagi ABK juga mempertimbangkan banyaknya jumlah penyandang disabilitas dalam usia sekolah, di DIY 3507 ABK usia sekolah terbagi dalam tiga kelompok usia yaitu dari 737 (21%) ABK berusia 0-5 tahun, 1.227 (35%) ABK berusia 6-12 tahun dan 1.543 (44%) berusia 13-18 tahun terbagi di 5 wilayah kabupaten/ kota di DIY dengan

rincian jumlah ABK di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Jumlah ABK di Daerah Istimewa Yogyakarta
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan DIY, 2013

Kabupaten Sleman adalah kabupaten/kota dengan jumlah ABK tertinggi di DIY dengan 864 ABK. Kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi memiliki jumlah ABK terendah yaitu 269 ABK. Jumlah ABK di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 687 ABK, Kabupaten Bantul berjumlah 842 ABK dan Kabupaten Gunungkidul berjumlah 851 ABK. Kabupaten Sleman berada di urutan pertama dengan jumlah ABK terbanyak, diikuti Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo dan terakhir Kota Yogyakarta, dengan tingkat pendidikan yang ditempuh pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah ABK Bersekolah di DIY

	Jumlah ABK	TK	SD	SMP	SMA	Siswa Sekolah Inklusi	Siswa SLB & Tidak Sekolah
Kulon Progo	687		189	7		196	491
Bantul	842	2	573	47	1	622	220
Gunungkidul	851	12	686			814	37

Lanjutan tabel 1.1.

	Jumlah ABK	TK	SD	SMP	SMA	Siswa Sekolah Inklusi	Siswa SLB & Tidak Sekolah
Sleman	864	4	484	74		558	306
Yogyakarta	269		189	41		234	35
Jumlah						2424	1089

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan DIY, 2013

Data Badan Perencanaan Pembangunan DIY (Bappeda DIY) tahun 2013 menunjukkan lebih banyak ABK menempuh pendidikan di sekolah inklusi, 2.424 ABK (55,1%) dari total jumlah ABK yang ada di DIY dan 1.089 ABK (44,9%) lainnya bersekolah di SLB atau belum bersekolah sama sekali. Prosentase ABK yang bersekolah di sekolah inklusi yang lebih tinggi ini juga setara dengan jumlah sekolah inklusi yang memang lebih banyak. Total terdapat 5 TK, 126 SD, 20 SMP, dan 21 SMA inklusi yang tersebar di DIY. Persebaran Sekolah Luar Biasa di DIY secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Sekolah Luar Biasa di DIY Tahun 2013

Kabupaten/Kota	SLB Negeri	SLB Swasta
Kulon Progo	1	7
Bantul	1	18
Gunungkidul	2	9
Sleman	1	28
Kota Yogyakarta	3	6
Jumlah	8	68

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2013

Total terdapat 76 SLB di DIY dengan jumlah SLB terendah di Kabupaten Kulon Progo, dan jumlah SLB tertinggi di Kabupaten Sleman. Sekolah Luar Biasa dapat terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1991

Pendidikan Luar Biasa terdiri dari beberapa satuan pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) atau saat ini Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) atau saat ini Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), sehingga tidak semua SLB tersebut memiliki TKLB, SMPLB, dan SMALB. Data Direktorat Pembinaan SLB Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan mayoritas SLB yang ada di Indonesia memiliki SDLB, dan paling sedikit memiliki SMALB (Sunardi, 2010).

Sekolah Luar Biasa memiliki satuan pendidikan/lembaga berdasarkan pengelompokan jenis disabilitas yang mampu untuk diwadahi, sehingga masing-masing SLB memiliki jenis disabilitas berbeda yang dapat diwadahi. SLB A untuk tunanetra, SLB B untuk tunarungu, SLB C untuk tunagrahita, SLB D untuk tunadaksa, SLB E untuk tunalaras dan SLB G untuk tunaganda. Pengelompokan tersebut karena ABK memiliki jenis disabilitas yang beragam, dengan kebutuhan metode pendidikan sesuai dengan jenis disabilitas anak. Tabel 1.3 menunjukkan data ABK di DIY berdasar jenis disabilitasnya.

Tabel 1.3 Data Jenis Disabilitas ABK di DIY

Kabupaten/ Kota	Jenis Kecacatan													
	Tubuh		Ganda		Mental Retardasi		Netra		Ruwi		Eks kronis		Eks psikotik	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kulon Progo	116	91	33	15	137	134	25	13	63	33	7	5	11	4
Bantul	149	122	50	40	173	117	19	17	57	67	6	1	13	11
Gunungkidul	191	133	46	25	150	128	23	15	57	62	4	2	9	6
Sleman	140	93	41	39	222	163	24	14	52	48	5	8	9	6
Yogyakarta	42	24	7	10	66	59	6	3	16	21	3	1	5	6
Jumlah	638	463	177	129	748	602	97	62	229	231	25	17	56	63

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2013

ABK dengan retardasi mental (tunagrahita) adalah yang paling tinggi, diikuti anak dengan cacat tubuh (tunadaksa), kemudian tunarunguwicara, tunaganda, tunanetra, eks kronis, dan

eks psikotik. Jenis disabilitas yang dimiliki ABK merupakan faktor penting untuk menentukan jenis dan karakteristik pendidikan selain tingkat intelegensi ABK.

Jumlah ABK usia remaja yaitu antara 13-18 tahun adalah yang paling banyak di DIY, sekitar 44% dari keseluruhan jumlah ABK. Tingginya ABK usia remaja tersebut mengindikasikan pentingnya pendidikan pada jenjang SMA baik melalui SMA inklusi, SMK inklusi maupun SMALB yang memberikan bekal agar ABK dengan usia remaja mampu hidup secara mandiri di masyarakat. Pendidikan bagi ABK usia remaja adalah yang paling membutuhkan peningkatan melihat jumlah partisipasi pendidikan ABK rendah pada jenjang pendidikan SMA pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Jumlah ABK ditingkat SD, SMP, dan SMA

Kategori Usia	Tingkat Sekolah	Jumlah Siswa
0-5 th	TK	18
6-12	SD	2121
13-18 th	SMP, SMA	285

Sumber : Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2013

Jumlah ABK tertinggi berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY (Bappeda DIY) tahun 2013 adalah di Kabupaten Sleman dengan 864 ABK, 558 diantaranya sudah bersekolah di sekolah inklusi dan 306 ABK sisanya ditampung oleh 29 SLB yang tersebar di Kabupaten Sleman atau belum bersekolah. Gunungkidul adalah kabupaten kedua dengan jumlah ABK terbanyak yaitu 851 ABK dan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi dengan 814 ABK di sekolah inklusi dan 34 ABK sisanya belum bersekolah atau telah ditampung oleh 11 SLB di Kabupaten Gunungkidul. Bantul dengan 842 ABK, sebanyak 622 ABK telah menempuh pendidikan di sekolah inklusi, 220 ABK yang tersisa belum bersekolah atau telah ditampung oleh 19 SLB

di Kabupaten Bantul. Kulon Progo dengan 687 ABK, memiliki tingkat partisipasi pendidikan terendah di sekolah inklusi dengan 196 ABK, 491 ABK yang tersisa belum bersekolah atau telah ditampung oleh 8 SLB di Kabupaten Kulon Progo. Kota Yogyakarta memiliki jumlah ABK terendah yaitu 269 ABK, dengan 234 ABK bersekolah di sekolah inklusi dan 35 ABK bersekolah di 9 SLB yang ada di Kota Yogyakarta atau belum bersekolah.

Korelasi antara data jumlah ABK dengan jumlah ABK yang bersekolah di SLB atau belum bersekolah, Kabupaten Kulon Progo adalah menunjukkan potensi pembangunan SLB tambahan. Daya tampung yang sangat sedikit bagi ABK di sekolah inklusi dan di SLB, sementara jumlah ABK di Kabupaten Kulon Progo yang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah sekolah inklusi atau SLB yang cukup rendah. 687 ABK ditampung oleh 25 sekolah inklusi yang telah menampung 196 ABK dan hanya terdapat 8 SLB. Data Bappeda DIY tahun 2013 menunjukkan terdapat 491 ABK yang sudah bersekolah di SLB dan ada yang tidak bersekolah. Melihat sedikitnya jumlah SLB dan banyaknya jumlah ABK yang belum tertampung maka tingkat ABK yang berpotensi belum bersekolah sama sekali cukup tinggi.

Jumlah partisipasi pendidikan ABK semakin rendah seiring meningkatnya jenjang pendidikan hal ini dapat terlihat dari sedikitnya siswa ABK pada jenjang pendidikan SMA di Tabel 1.3 padahal jumlah ABK tertinggi adalah pada usia remaja. Salah satu cara meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan bagi ABK adalah pemantauan terhadap perkembangan dan potensi ABK secara berkelanjutan pemantauan juga diperlukan untuk mencegah ABK yang berpotensi putus sekolah. Sekolah dari jenjang SD-SMA yang terintegrasi dalam satu kawasan juga terintegrasi sistem

pendidikannya dapat memantau perkembangan pendidikan ABK secara berkelanjutan. Hal ini juga mendukung RPJMD DIY 2012-2017 untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, hal tersebut menambah potensi adanya SLB terpadu bagi ABK di DIY khususnya di Kabupaten Kulon Progo.

SLB Terpadu merupakan sebuah sarana untuk meningkatkan partisipasi pendidikan bagi siswa ABK dengan pemantauan secara berkelanjutan, maka adanya asrama sebagai fasilitas penunjang merupakan potensi untuk meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan ABK. Pemantauan perkembangan ABK dapat dilakukan secara menyeluruh dalam pendidikan di sekolah ditambah dengan pemantauan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari. Asrama juga merupakan sarana pembelajaran kegiatan dalam kehidupan sehari-hari (*living skill*) juga dapat mendukung tingkat partisipasi belajar ABK, dengan memberi kemudahan fasilitas bagi ABK yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari sekolah.

Anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis disabilitas yang dimiliki menunjukkan jumlah anak dengan tunagrahita yang terbanyak, namun jenis pendidikan anak tunagrahita ditentukan berdasar tingkat intelegensi. Anak tunagrahita yang memiliki IQ di atas 70 berkemungkinan besar bersekolah di sekolah inklusi. Begitu pun anak dengan tunadaksa yang memiliki tingkat intelegensi memadai lebih banyak ditampung di sekolah inklusi karena guru tidak diharuskan memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi. Sementara anak dengan tunaganda, tunanetra dan tunarungu wicara memerlukan metode pembelajaran, cara berkomunikasi, dan kriteria perancangan khusus untuk mendukung kebutuhan ABK dalam belajar yang secara khusus dapat diwadahi

dalam SLB tipe G untuk tunaganda, A untuk tunanetra, dan B untuk tunarungu.

Yayasan Pelita Harapan merupakan sebuah yayasan pendidikan yang bergerak di tingkat TK hingga Universitas. Yayasan ini memiliki berbagai program beasiswa dan donatur dari berbagai negara di dunia. Memiliki banyak cabang sekolah yang terus berkembang dan bertambah. Pada tingkat TK hingga SMA Yayasan Pelita Harapan memiliki tiga cabang sekolah yaitu Sekolah Pelita Harapan, Sekolah Dian Harapan, dan Sekolah Lentera Harapan yang setiap sekolahnya memiliki cabang sekolah di berbagai daerah.

Sekolah Lentera Harapan adalah salah satu cabang sekolah yang memiliki cabang sekolah khusus untuk anak autis di Klaten, Jawa Tengah. Yayasan Pelita Harapan terus berusaha meningkatkan pendidikan anak Indonesia dengan membangun sekolah di seluruh Indonesia. Yayasan Pelita Harapan menjadi Yayasan yang berpotensi mendirikan SLB terpadu berasrama yang juga dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi ABK tunaganda, tunanetra dan tunarungu di Kulon Progo.

Analisis di atas menunjukkan bahwa SLB terpadu berasrama tipe/G-AB di Kulon Progo bagi anak tunaganda, tunanetra, dan tunarungu. Pembangunan juga didukung dengan adanya potensi Yayasan Pelita Harapan sebagai pemilik bangunan.

I.1.2 Latar Belakang Permasalahan

Anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak normal pada umumnya, dikarenakan disabilitas yang mereka miliki. Anak dengan tunaganda yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas, anak dengan tunanetra yang kurang dalam kemampuan melihat, anak dengan tunarungu

yang memiliki kerusakan atau cacat pendengaran, tentu memiliki kebutuhan khusus dalam belajar. Kebutuhan khusus anak dengan tunaganda, tunanetra dan tunarungu yang perlu diwadahi oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) tipe G, A dan B.

Kebutuhan khusus anak tunaganda, tunanetra dan tunarungu memiliki karakteristik khusus, anak tunanetra menggunakan kemampuan perabaan dan pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar (Asep AS. Hidayat, Ate Suwandi, 2013). Anak tunarungu secara fungsional intelegensi dibawah anak normal walau dari segi intelegensi secara potensial tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya, sehingga memerlukan waktu belajar lebih lama dalam proses belajarnya terutama untuk mata pelajaran yang diverbalisasikan (Haenudin, 2013). Anak dengan tunaganda dengan lebih dari satu jenis disabilitas memiliki karakteristik gabungan sesuai dengan disabilitas yang dimiliki.

Karakteristik anak yang khusus juga mempengaruhi proses belajar ABK sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik ABK. Sekolah dengan kelengkapannya sebagai sarana pembelajaran bagi ABK juga memerlukan desain yang komunikatif untuk mendukung proses belajar ABK.

SLB terpadu dilengkapi dengan asrama diharapkan dapat mengakomodir pendidikan ABK secara berkelanjutan. Mengakomodir kebutuhan ABK juga mencakup aspek perancangan arsitektur bangunan yang sesuai dengan karakteristik khusus ABK dan kurikulum pembelajaran yang didukung oleh penataan ruang dalam dan ruang luar sebagai prasarana dalam proses pembelajaran ABK. Ruang merupakan salah satu komponen penting dalam arsitektur karena fungsinya sebagai wadah kegiatan

manusia (Haryadi, B. Setiawan, 2014, p. 9). Perancangan SLB untuk mendukung kegiatan pembelajaran bagi ABK memerlukan adanya pengolahan tata ruang yang sesuai dengan kurikulum dan proses pembelajaran yang khusus. Pengolahan tata ruang yang mampu mendukung kegiatan ABK mencakup pengolahan tata ruang dalam dan luar yang berkesinambungan.

Konsep mengenai pemahaman lingkungan (*environmental learning*) adalah “proses pemahaman yang menyeluruh dan menerus tentang suatu lingkungan oleh seseorang” (Rapoport, 1977). Kognisi seseorang akan lingkungan merupakan pengetahuan, pemahaman yang dinamis, pada tahap awal kognisi seseorang terhadap lingkungan menghasilkan kognisi sementara, kemudian berkembang menjadi kognisi baru, dan kemudian kognisi ini mempengaruhi pola perilaku seseorang. Pembentukan persepsi lingkungan merupakan bagian penting dalam proses merancang, membentuk persepsi lingkungan, memberi kognisi baru yang akhirnya mempengaruhi pola perilaku pengguna.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana wujud desain Sekolah Luar Biasa terpadu berasrama tipe/G-AB di Kulon Progo yang komunikatif bagi ABK melalui pengolahan tata ruang luar dan tata ruang dalam dengan pendekatan pemahaman lingkungan (*environmental learning*)?

I.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Merancang konsep Sekolah Luar Biasa terpadu berasrama tipe/G-AB bagi anak tunaganda, tunanetra dan tunarungu yang komunikatif untuk mengakomodir kebutuhan khusus siswa melalui pengolahan tata ruang luar dan tata ruang dalam dengan pendekatan pemahaman lingkungan (*environmental learning*).

1.3.2 Sasaran

Sasaran pembahasan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Studi karakteristik dan kebutuhan khusus anak tunaganda, tunanetra dan tunarungu.
2. Pengolahan tata ruang dalam dan luar yang komunikatif.
3. Studi pendekatan pemahaman lingkungan (*environmental learning*).
4. Pengolahan tata ruang dalam dan luar Sekolah Luar Biasa terpadu berasrama tipe G-AB yang komunikatif dengan pendekatan pemahaman lingkungan (*environmental learning*).

I.4 Lingkup Studi

I.4.1 Materi Studi

Identifikasi kebutuhan dasar dalam proses perencanaan dan perancangan untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai.

1. Lingkup Spasial

Bagian yang akan diolah sebagai penekanan desain pada objek studi yaitu tata ruang dalam dan tata ruang luar pada Sekolah Luar Biasa/G-AB di Kulon Progo.

2. Lingkup Substansial

Lingkup ruang dalam dan ruang luar pada Sekolah Luar Biasa/G-AB di Kulon Progo sebagai penekanan studi yaitu suprasegmen arsitektur meliputi bentuk, jenis bahan, warna, tekstur, dan ukuran/ skala/ proporsi pada elemen-elemen pembentuk ruang.

3. Lingkup Temporal

Rancangan Sekolah Luar Biasa/G-AB di Kulon Progo ini diharapkan menjadi penyelesaian penekanan studi untuk kurun waktu 20 tahun.

I.4.2 Pendekatan Studi

Penyelesaian penekanan studi menggunakan pendekatan pemahaman lingkungan (*environmental learning*) untuk mewujudkan tata ruang dalam dan ruang luar yang komunikatif dalam mengakomodir kebutuhan khusus siswa Sekolah Luar Biasa/G-AB di Kulon Progo.

I.5 Keaslian Penulisan

Karya tulis berjudul Sekolah Luar Biasa/G-AB di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki kesamaan judul dengan karya tulis lain, yaitu :

a. Tugas Akhir Strata-1

Judul : Sekolah Luar Biasa Tipe C di Klaten
 Penyusun : Henrica Prita S (10 01 13623)
 Program Studi : Arsitektur
 Fakultas : Teknik
 Universitas : Atma Jaya Yogyakarta, 2015
 Penekanan : Wujud rancangan Sekolah Luar Biasa tipe C di Klaten yang mampu mengoptimalkan perkembangan intelektual anak tunagrahita melalui pengolahan tata ruang dan tata rupa dengan pendekatan arsitektur modern.

b. Tugas Akhir Strata-1

Judul : Perancangan Bangunan Sekolah Luar Biasa Tunarungu dengan Pendekatan *Deafspace Guidelines*
 Penyusun : Liana Dwi Ariyani
 Program Studi : Arsitektur
 Fakultas : Teknik
 Universitas : Gadjah Mada, 2014

Penekanan : Merencanakan dan merancang bangunan Sekolah Luar Biasa Tunarungu sebagai sarana belajar bagi anak tunarungu yang mampu mewadahi fungsi utama serta memberikan kenyamanan dan mendukung proses pembelajaran.

I.6 Metode Studi

I.6.1 Pola Prosedural

Metode yang digunakan dalam proses pemecahan masalah adalah deskriptif, deduktif dan analisis.

1. Deskriptif

Menjelaskan kajian mengenai Sekolah Luar Biasa bagi anak berkebutuhan khusus tunaganda, tunanetra dan tunarungu, fenomena dan data di lapangan untuk menjelaskan latar belakang permasalahan dan alternatif pemecahan masalah yang mendukung pengadaan proyek.

2. Deduktif

Metode deduktif dilakukan dengan melakukan studi terkait yang mendukung proses perancangan seperti studi mengenai Sekolah Luar Biasa, karakteristik anak berkebutuhan khusus tunaganda, tunanetra, dan tunarungu.

3. Analisis

Analisis dilakukan berdasarkan kompilasi data. Data-data mengenai peraturan bangunan, standar baku mengenai sistem manusia sehingga menghasilkan standar perancangan, juga data mengenai sistem lingkungan yang meliputi kajian konteks lingkungan dan tapak serta pemecahan masalah berupa konsep perancangan.

I.6.2 Tata Langkah



I.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang pengadaan proyek, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup studi, keaslian penulisan, metode studi, tata langkah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN SEKOLAH LUAR BIASA/G-AB

Tinjauan Sekolah Luar Biasa/G-AB merupakan tinjauan teori mengenai pengertian dan karakteristik anak tunaganda, anak tunanetra dan anak tunarungu, pengertian Sekolah Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa/G-AB, serta standar-standar umum perancangan Sekolah Luar Biasa.

BAB III TINJAUAN WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO

Wilayah objek studi ditinjau dari lingkup makro hingga lingkup mikro diawali dengan tinjauan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian tinjauan Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten terpilih, tinjauan Kecamatan Pengasih sebagai kecamatan terpilih dan terakhir tinjauan mengenai lokasi tapak terpilih.

BAB IV TINJAUAN PUSTAKA

Teori pendukung perwujudan ruang dalam dan ruang luar yang komunikatif bagi anak berkebutuhan khusus dengan pendekatan pemahaman lingkungan (*environmental learning*).

BAB V ANALISIS PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Analisis mengenai data-data acuan bagi perencanaan dan perancangan untuk mendesain sekolah luar biasa.

BAB VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Konsep usulan desain bangunan “Sekolah Luar Biasa/G-AB di Kulon Progo” yang komunikatif untuk mengakomodir kebutuhan khusus anak tunaganda, tunanetra dan tunarungu dikaitkan dengan pendekatan pemahaman lingkungan (*environmental learning*).